

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Migrasi

2.1.1.1 Definisi Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas-bata administrasi, politik/negara, yang sering juga diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, migrasi merupakan perpindahan sumber daya manusia yang umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti menyangkut lapangan dan jenis pekerjaan serta alasan lain seperti keamanan (Mulyadi, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, migrasi sebagai perpindahan tempat tinggal yang melampaui batas provinsi, dengan batas waktu yang telah tinggal di tempat tujuan selama enam bulan atau lebih. Jadi secara umum migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah asal menuju daerah tujuan dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi diartikan sebagai suatu gerak penduduk secara geografis, spesial atau territorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tujuan (Rusli, 1994). Sementara itu Martin (2003) menyatakan migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perubahan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan menurut Lee (1996) mengatakan bahwa yang disebut migrasi haruslah melibatkan faktor terjadinya perubahan tempat tinggal yang permanen dengan tidak memperhatikan jarak yang ditempuh dalam proses perpindahan tersebut. Dalam menelaah migrasi ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Ukuran yang pasti untuk dimensi waktu tidak ada, karena sulit menetapkan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal agar dapat dianggap sebagai seorang migran, tetapi biasanya definisi yang digunakan dalam sensus penduduk (Munir, 1981).

Definisi migran menurut PBB dalam Artika (2003) adalah seseorang yang berpindah tempat kediaman dari suatu unit administratif atau politis ke unit daerah administratif atau daerah politis yang lain. Banyak ahli dan penelitian mengatakan bahwa migran bersifat selektif. Terdapat ciri khusus yang membedakan migran dan non migran, terutama dalam hal umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, dan jenis pekerjaan. Dengan adanya sifat selektif dalam proses migrasi maka timbullah ciri-ciri atau sifat-sifat karakteristik dari mereka yang turut serta dalam proses migrasi tersebut.

2.1.1.2 Teori-Teori Migrasi

1. Teori Todaro

Menurut Mantra (2000) teori migrasi Todaro ini bertolak dari asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Keputusan seorang individu untuk melakukan migrasi ke kota merupakan keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Teori Todaro mendasarkan diri pada pemikiran bahwa arus migrasi itu berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara desa dengan kota. Namun, pendapatan yang dipersoalkan disini bukan pendapatan yang actual, melainkan pendapatan yang diharapkan (*expected income*).

Para migran senantiasa mempertimbangkan dan membandingkan-bandingkan pasar-pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di sektor pedesaan dan perkotaan, kemudian memilih salah satu diantaranya yang sekiranya akan dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, diukur berdasarkan besar kecilnya angka selisih antara pendapatan riil dari pekerjaan di kota dan dari pekerjaan di desa. Angka selisih tersebut juga senantiasa diperhitungkan terhadap besar kecilnya peluang migran yang bersangkutan untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Adapun model migrasi Todaro memiliki empat pemikiran dasar sebagai berikut:

- 1) Migrasi desa-kota dirangsang, terutama sekali oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional dan langsung yang berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya relatif migrasi itu

sendiri (sebagian besar terwujud dalam bentuk-bentuk atau ukuran lain, misalnya saja kepuasan psikologi).

- 2) Keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di pedesaan (pendapatan yang diharapkan adalah sejumlah pendapatan yang secara rasional bisa diharapkan akan tercapai di masa-masa mendatang). Besar kecilnya selisih besaran upah aktual di kota dan di desa, serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan sesuai yang diharapkan.
- 3) Kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota.
- 4) Migrasi desa-kota bisa saja terus berlangsung meskipun pengangguran diperkotaan sudah cukup tinggi. Kenyataan ini memiliki landasan yang rasional, yakni para migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah yang lebih tinggi yang nyata (memang tersedia). Dengan demikian, lonjakan pengangguran diperkotaan merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari adanya ketidakseimbangan kesempatan ekonomi yang sangat parah antara perkotaan dan daerah pedesaan (antara lain berupa kesenjangan tingkat upah tadi), dan ketimpangan-ketimpangan seperti itu amat mudah ditemui di kebanyakan negara-negara di dunia ketiga.

2. Teori Migrasi Ravenstein (1985)

Teori migrasi menurut Ravenstein (1985) mengungkapkan tentang perilaku mobilisasi penduduk (migrasi) yang disebut dengan hukum-hukum migrasi berkenaan sampai sekarang. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.
- b. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting.
- c. Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi.
- d. Semakin tinggi pengaruh kota terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut.
- e. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.
- f. Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.
- g. Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah.

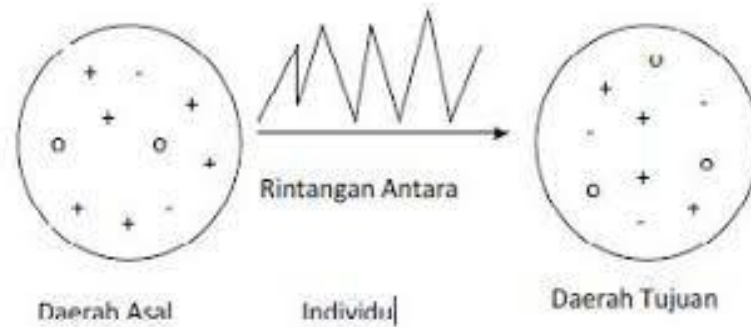
- h. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

3. Teori Migrasi menurut Everett S. Lee

Everett S. Lee (1976) mengemukakan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Bila melukiskan di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif, negatif dan adapula faktor-faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberi nilai yang menguntungkan jika bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya di daerah tersebut terdapat sekolah, kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Sedangkan faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat cenderung menimbulkan arus imigrasi penduduk.

Selanjutnya Everett S. Lee (1976) menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi rintangan, misalnya ongkos pindah yang tinggi dan menurutnya terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi penduduk antara lain :

- a. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
- b. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan
- c. Rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan
- d. Faktor-faktor daerah asal dan daerah tujuan



Sumber: Everett S. Lee (1970)

Gambar 2.1
Faktor-Faktor Yang Terdapat Pada Daerah Asal dan Daerah Tujuan
serta Rintangannya Antara

Pada masing-masing daerah terdapat faktor-faktor yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah tersebut (faktor positif) dan faktor-faktor yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan seseorang untuk meninggalkan daerah tersebut (faktor negatif). Disamping itu terdapat faktor-faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya terhadap daerah tersebut, faktor ini disebut dengan faktor nol (0). Diantara ke faktor tersebut, faktor individu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Penilaian positif atau negatif suatu daerah tergantung pada individu itu sendiri.

2.1.1.3 Jenis-jenis Migrasi

Migrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Migrasi Nasional

Menurut Mulyadi (2003 : 32) migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Adapun jenis migrasi nasional yaitu:

a) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain lain untuk menetap. Biasanya untuk kepentingan pembangunan atau alasan lain. Tujuan utama transmigrasi antara lain pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup transmigran (Indah, 2013)

b) Urbanisasi

Menurut Indah (2013 : 8) urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Urbanisasi terjadi karena kota mempunyai daya tarik sebagai daerah tujuan dan desa mempunyai daya dorong untuk ditinggalkan. Daya tarik kota antara lain tersedia berbagai lapangan pekerjaan, upah tenaga kerja tinggi, fasilitas hidup lengkap, dan pendidikan yang lebih unggul. Kota besar memang menjanjikan fasilitas yang lebih lengkap. Sedangkan daya dorong desa antara lain lapangan pekerjaan di luar bidang pertanian terbatas, lahan pertanian semakin sempit, upah tenaga kerja rendah, dan fasilitas umum terbatas.

c) Ruralisasi

Pengertian ruralisasi yaitu kembalinya penduduk ke desa setelah menetap di kota atau bisa dikatakan kembalinya pelaku urbanisasi ke daerah asal. Alasan terjadinya ruralisasi yang paling banyak adalah selesainya pekerjaan di kota sehingga kembali ke desa atau sudah merasa bosan tinggal di kota lalu ingin hidup tenang di desa (Indah, 2013)

2. Migrasi Internasional

Menurut Mulyadi (2003 : 32) migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri atau perpindahan penduduk luar negeri ke dalam negeri (melewati batas negara). Adapun untuk jenis migrasi internasional, antara lain sebagai berikut:

a) Imigrasi

Pengertian imigrasi adalah masuknya penduduk yang ada dalam negara lain ke suatu negara untuk menetap dengan tujuan untuk secara totalitas menjadi bagian daripada negara yang bersangkutan.

b) Emigrasi

Pengertian emigrasi yaitu keluarnya penduduk yang ada dalam sebuah negara ke suatu negara lain untuk menetap dengan tujuan secara nyata mengambi pada negara baru.

c) Remigrasi

Remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asal. Hal ini terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang sudah habis masa kerjanya, kemudian kembali ke Indonesia.

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi

Menurut Munir (2007) mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong migrasi misalnya:
 - a. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.
 - b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya di pedesaan) akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin mesin. (*capital intensive*).
 - c. Kecilnya upah di tempat asal.
 - d. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
 - e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir.
 - f. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau Panjang atau adanya wabah penyakit.

2. Faktor-faktor penarik migrasi antara lain:

- a. Adanya rasa superior ditempat yang baru atau kesempatan yang baru untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
- b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik.
- c. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah, transportasi, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.
- e. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
- f. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.

2.1.2 Upah Minimum Provinsi

2.1.2.1 Definisi Upah Minimum

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan

pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintahan (Rusli, 2011:91)

Menurut Soedarjadi (2008 : 75), upah minimum adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.

Pengertian upah minimum secara umum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum hanya ditunjukkan bagi pekerja dengan masa kerja nol (0) sampai dengan satu (1) tahun. Perkembangan penetapan upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Namun pada saat ini penetapan upah minimum masih dibawah pemenuhan kebutuhan hidup layak karena penetapannya dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keseimbangan perusahaan.

2.1.2.2 Definisi Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota

Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah bersangkutan.

2.1.2.3 Prosedur Penetapan Upah Minimum

Menurut Ruky (2002 : 7) Pemerintah Indonesia selalu mengubah-ubah kebijakan ketenagakerjaan terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), dan sekarang berubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebijakan pengupahan di Indonesia lebih kepada perpaduan konsep-konsep pengupahan tersebut. Hal ini disebabkan kompleksitas permasalahan pengupahan, seperti adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standar kebutuhan fisik minimum.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yaitu :

- a. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- c. Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai Kebutuhan Hidup Layak pada periode yang sama.
- d. Untuk pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dalam bentuk peta jalan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota diadakan satu tahun sekali.: 560/5796/III.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) bahwa dalam mendorong peningkatan pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan upah minimum. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada kebutuhan hidup layak.

Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 sebagai berikut:

- 1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
 - b. Indeks Harga Konsumen (IHK)
 - c. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
 - d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
 - e. Kondisi pasar kerja
 - f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita
- 2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), disamping pertimbangan

butir 1 diatas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sectoral (Hakim, 2006 : 42). Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang berlaku bagi buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang diatur dalam KEPMENAKERTRANS Nomor: Kep-231/Men/2003.

2.1.2.4 Faktor Pertimbangan dalam Penetapan Upah Minimum

a. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak adalah dasar dalam penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup layak merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja selama satu bulan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori perhari dan pelaksanaan tahapan pencapaian tersebut terdiri dari 60 items. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

- 1) Makanan dan Minuman (11 items)
- 2) Sandang (13 items)
- 3) Perumahan (26 items)
- 4) Pendidikan (2 items)
- 5) Kesehatan (5 items)

6) Rekreasi dan Tabungan (2 Items)

7) Transportasi (1 items)

Komponen tersebut yang menjadi bahan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten, yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan kabupaten yang terdiri dari unsur tripartite, yakni: asosiasi pengusaha, serikat buruh/pekerja, dan pemerintah yang membentuk tim survey untuk melakukan survey pasar terhadap komponen-komponen tersebut.

b. Produktivitas Makro

Sesuai dengan Permenakertrans No. Per-17/MEN/VII/2005 pasal 4 ayat (6) adalah perbandingan antara jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai PDRB merupakan hasil dari seluruh tenaga kerja yang melakukan proses produksi pada waktu itu. Sehingga nilai yang diperoleh merupakan hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada disuatu daerah yang di data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai yang didata secara *time series* dibandingkan dengan data pertumbuhan tenaga kerja akan dapat membantu memprediksi perluasan kesempatan tenaga kerja.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada dan didata oleh BPS dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara makro sering dikaitkan bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka kerja merupakan unsur dari masyarakat

sehingga apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi penambahan *income* dan penambahan *income* bagi masyarakat pekerja dapat juga dikatakan sebagai pertambahan upah atau kenaikan upah (Rusli, 2014:205). Pendekatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi maka harus ada kenaikan upah karena pembentukan ekonomi dipengaruhi oleh adanya kenaikan upah.

d. Usaha Yang Paling Tidak Mampu (*Marginal*)

Negara Indonesia merupakan negara yang *labour surplus*, maka pemerintah berupaya untuk mendorong perluasan kesempatan dan penambahan tenaga kerja. Karena tingginya pengangguran maka hal ini akan mempengaruhi kondisi syarat-syarat kerja. Sepanjang tingkat pengangguran tinggi maka akan sulit dilakukan perbaikan syarat-syarat kerja termasuk perbaikan upah dalam melaksanakan hubungan kerja. (*Ibid*, :206)

e. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, dimana pencarian kerja (penawaran tenaga kerja) jauh lebih besar dari lowongan kerja (permintaan tenaga kerja) maka seperti ini akan sulit memperbaiki syarat-syarat perbaikan kerja. Maka dalam kondisi ini diperlukan penetapan upah minimum (*Ibid* : 208)

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.3.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi (BPS, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan PDRB (Zaris, 1987). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk :

- a. PDRB atas harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB, ini

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya

- b. PDRB atas dasar harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi, ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.3.2 Perhitungan PDRB

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode diantaranya yaitu:

- a. Metode Langsung

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu :

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsector atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2012:26). Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu;

1. pertanian
2. pertambangan dan penggalian
3. industri pengolahan
4. listrik, gas, dan air bersih
5. bangunan
6. perdagangan, hotel dan restoran
7. pengangkutan dan komunikasi
8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta yang tidak mencari untung.
2. Konsumsi pemerintah.
3. Pembentukan modal tetap domestic bruto.

4. Perubahan stok.
5. Ekspor *netto*. (BPS, 2012:27)

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal, dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajiannya disusun dalam dua bentuk yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Pengertian PDRB atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya (BPS, 2012:27). PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005).

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi (BPS, 2012:27). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsector pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produk fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB

Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
4. Inflasi
5. Penanaman Modal Asing (PMA)
6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA)
7. Pengeluaran Pemerintah Daerah
8. Tenaga Kerja

2.1.4 Jumlah Penduduk

2.1.4.1 Definisi Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Mantra, 2009).

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2012 : 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis, kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2.1.4.2 Teori Penduduk

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2004: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup. Pada kasus ini terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. (Edmund, 2015)

Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada consensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat

kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa yang akan datang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, suatu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi

untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Disisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996: 68)

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah. Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

Todaro (2000: 144), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu. Gagasan yang dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2006: 351) sebagai berikut:

1. Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil
2. Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara
3. Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara berkembang.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan pada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah kebawah (Todaro, 2006: 259-260)

2.1.4.3 Komposisi Penduduk

- a. Biologi: umur, jenis kelamin
- b. Sosial : pendidikan, status
- c. Ekonomi: jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan
- d. Geografi: tempat tinggal
- e. Budaya: agama, adat istiadat, dan lain sebagainya

2.1.5 Pendidikan

2.1.5.1 Definisi Tingkat atau Jenjang Pendidikan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga merupakan salah satu dari empat tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat.

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan, 2005:22). Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang Pendidikan formal seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas :

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun. Diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun disekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang

sederajat. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi Pendidikan dasar. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah agama, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa (Kunaryo, 2000)

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademis dan/atau professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

2.1.5.2 Konsep Pendidikan

Menurut Wina Sanjaya (2006: 2-3) terdapat 4 konsep pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana
2. Proses Pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
3. Suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya
4. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

2.1.5.3 Tujuan Pendidikan

Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan. Semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan semakin banyak pula yang terserap menjadi tenaga kerja dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya tingkat Pendidikan tinggi akan menjadikan sumber daya manusia berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang akhirnya dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.4 Teori Pendidikan

Teori yang dikemukakan oleh Todaro (2006) bahwa penduduk yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dan upah yang di dapat lebih tinggi di sektor modern.

Terdapat pula teori yang dikemukakan oleh Ravenstein (1985) bahwa penduduk yang mempunyai tingkat Pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut judul yang diteliti.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Agus Sumanto (2009) dengan judul “Identifikasi faktor-faktor sosial-ekonomi migrasi tenaga kerja (kasus ibu rumah tangga yang bekerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian)” | Variabel yang sama yaitu tingkat pendidikan | Variabel yang berbeda yaitu upah di sector pertanian, pendapatan keluarga, jumlah tanggungan keluarga, dan luas lahan | Hasil penelitian ini variabel tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap migrasi tenaga kerja | Jurnal ekonomi studi pembangunan http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5126/1853 volume 1 no 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Kaisar Hasudungan dan Kerniwati Retno (2013) dengan Judul “Analisis Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan, dan status perkawinan terhadap keputusan migrasi sirkuler ke kota semarang” | Variabel bebas yang sama yaitu Pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu pendapatan, pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan, dan status perkawinan | Hasil akhir penelitian ini variabel pendidikan signifikan dan berpengaruh positif terhadap keputusan migrasi | Diponegoro Journal Of Economics http://ejournal-1.undip.ac.id/index.php/jme Volume 2, Nomor 3 |
| 3. | Edah Jubaedah (2019) dengan judul “analisis kependudukan provinsi Jawa Barat” | Variabel bebas yang sama yaitu PDRB dan jumlah penduduk | Variabel bebas yang berbeda yaitu perbedaan upah antar sektor industry dan pertanian, migrasi periode sebelumnya, dan investasi | Hasil penelitian ini variabel PDRB berpengaruh secara signifikan dan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi Jawa Barat | Jurnal unnur http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/viewFile/225/192 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Dedi Julianto, Alvin Alfian (2017) dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat migrasi keluar Sumatera Barat” | Variabel bebas yang sama yaitu PDRB | Variabel bebas yang berbeda yaitu rasio upah riil dan jarak | Hasil akhir penelitian ini variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat migrasi | Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas http://ojs.uinidha.ac.id/index.php/edb_dharmaaandalas/article/view/67/54 volume 19 no 2 |
| 5. | Moh. Isa Ashari dan Ahmad Kafrawi Mahmud (2018) dengan judul “apakah yang mempengaruhi fenomena migrasi masuk ke wilayah perkotaan?” | Variabel bebas yang sama yaitu UMP dan Kesempatan kerja | Variabel bebas yang berbeda yaitu investasi, pengeluaran pemerintah | Hasil penelitian ini variabel UMP dan kesempatan kerja berpengaruh terhadap migrasi masuk | Journal Economics , social, and developments studies http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/5237/4720 Vol.5 No.1 |
| 6. | Budi Hutomo (2015) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan migrasi Ulang Alik | Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu pendapatan, pernikahan, kepemilikan tanah, jenis kelamin, dan umur | Hasil penelitian ini variabel Pendidikan berpengaruh signifikan | Economics development analysis journal https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/14841 Vol.4 No.4 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Dio Dwi Saputra dan Winih Budiarti (2017) dengan judul "analisis data panel migrasi masuk risen di pulau Jawa dan Sumatera Periode 1995-2015 | Variabel bebas yang sama yaitu PDRB dan UMP | Variabel bebas yang berbeda yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka | Hasil penelitian ini variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan lalu UMP tidak berpengaruh Signifikan terhadap Migrasi masuk | Jurnal Kependudukan Indonesia http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/292/pdf_1 Vol. 12 No. 12 |
| 8. | Ahmad Shidiq (2016) dengan judul "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi commuter di kabupaten Demak" | Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu pendapatan, pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan, dan status perkawinan | Hasil penelitian ini variabel Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi | Economics Development Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj Volume 5 no. 4 |
| 9. | "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk melakukan migrasi risen dari kabupaten ke kota di Sumatera Barat" | Variabel bebas yang sama yaitu tingkat pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu umur, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan jenis kelamin | Hasil penelitian ini variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penduduk melakukan migrasi risen | Jurnal UNP http://repository.unp.ac.id/16818/ |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Cici Sasmi dan Nasri Bachtriar (2014) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke kota Padang” | Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan pendapatan | Hasil penelitian ini variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penduduk untuk melakukan migrasi | Jurnal unand http://repo.unand.ac.id/5114/1/ANALISIS%20MIGRASI%20INTERNAL20DI%20SUMATERA%20BARAT.pdf |
| 11. | Wahyu dan Sri Kusreni (2017) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di indonesia | Variabel yang sama yaitu PDRB, Pendidikan, dan jumlah penduduk | Variabel bebas yang berbeda yaitu pengangguran, kemiskinan | Hasil penelitian ini variabel PDRB, Pendidikan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, terhadap migrasi | Jurnal ilmu ekonomi terapan https://ejournal.unair.ac.id/JIE/article/view/5505/3396 Vol 2 No. 1 |
| 12. | Jamal Mirdad (2013) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja wanita Sumatera Barat keluar negeri” | Variabel yang sama yaitu tingkat pendidikan | Variabel yang berbeda yaitu variabel upah, umur, dan status pernikahan | Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap migrasi ke luar negeri | JKEP http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/ejournal/article/view/441 Vol. 1 No. 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Zhigang (2006) dengan judul “Rural-urban migration and wage determination: The case of Tianjin, China” | Variabel bebas yang sama yaitu pada upah | Variabel bebas yang berbeda tidak ada karena hanya 1 variabel yaitu upah | Hasil penelitian ini variabel upah mempengaruhi migrasi | China Economic Review https://doi.org/10.1016/j.chieco.2006.04.007 Vol. 17 No. 3 |
| 14. | Rachmad Budi Suharto (2018) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk risen di provinsi kalimantan timur” | Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu pendapatan, pekerjaan, usia, pengetahuan dan keterampilan, dan kepemilikan lahan | Hasil penelitian ini Pendidikan berpengaruh terhadap migrasi masuk | Jurnal ekonomi manajemen https://journals.umkt.ac.id/index.php/JEM/article/view/73 Vol. 2 No. 1 |
| 15. | Indi Najmutsaqib () dengan judul “pengaruh kepadatan penduduk, UMP, kesempatan kerja terhadap migrasi internasional tenaga kerja provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2016 | Variabel bebas yang sama yaitu UMP, | Variabel bebas yang berbeda yaitu kepadatan penduduk | Hasil penelitian ini variabel UMP berpengaruh terhadap migrasi internasional | Journal UINJKT |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Tatik Mariyanti (2010) dengan judul “Pengaruh industrialisasi terhadap migrasi per Provinsi di Indonesia pada tahun 2010” | Variabel bebas yang sama yaitu PDRB | Variabel bebas yang berbeda yaitu Penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah minimum | Hasil penelitian ini variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Migrasi per Provinsi di Indonesia pada tahun 2010 | https://media.neliti.com/media/publications/52760-ID-pengaruh-industrialisasi-terhadap-migrasi.pdf |
| 17. | Dyah Pramedia dan Omas (2014) dengan Judul “Pengaruh Migrasi Masuk tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2012” | Variabel bebas yang sama yaitu PDRB, dan Pendidikan | Variabel bebas yang berbeda yaitu kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan kriminalitas | Hasil penelitian ini PDRB dan Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi risen Masuk. | http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55397-Dyah%20Pramedia%20Nesya |

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan antara UMP dengan migrasi penduduk masuk Ke Provinsi DKI Jakarta

Eggert et al (2010) wilayah yang lebih miskin menunjukkan upah yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan masyarakat akan melakukan migrasi ke wilayah yang lebih kaya, namun mereka akan tetap berada di posisi terbawah karena kurangnya skill, hal ini diakibatkan oleh kurangnya

pendidikan yang dirasakan masyarakat tersebut. Namun, penetapan upah minimum di tiap provinsi dan kabupaten/kota tidak sama. Kota-kota besar cenderung menetapkan upah minimumnya lebih tinggi di banding daerah pedesaan. Hal ini lah yang akhirnya akan menarik bagi penduduk desa melakukan migrasi ke daerah lain dengan harapan memperoleh upah yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Fenomena ini sejalan dengan teori Todaro (2004) yang menjelaskan terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas.

Menurut teori *Human Capital* bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila pendapatan yang diperoleh di tempat tujuan lebih besar daripada pendapatan di daerah asal yang ditambah dengan biaya langsung migrasi (Simanjuntak, 1985). Sebagai ibukota negara, Jakarta memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya. Semakin tinggi UMP Jakarta maka jumlah migrasi penduduk masuk ke Jakarta juga akan semakin besar. Migran memilih pindah ke Jakarta kaarena melihat upah yang ia terima akan lebih besar dibandingkan dengan upah di daerah asal. Migran akan mengorbankan besarnya pendapatan yang seharusnya ia terima di daerah asal untuk mendapatkan pendapatan baru yang ia terima di daerah tujuan (Jakarta) demi memperbaiki taraf hidupnya. Dalam hal ini, pengorbanan migran untuk meninggalkan daerah asal serta pendapatan-pendapatan yang seharusnya ia terima dan menuju Jakarta adalah bagian dari investasi sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan jelas adanya hubungan antara UMP dengan migrasi penduduk masuk ke Jakarta.

2.2.2 Hubungan antara PDRB dengan migrasi penduduk masuk ke Provinsi DKI Jakarta

Seseorang untuk melakukan migrasi melihat tingkat PDRB daerah mana yang tinggi. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. PDRB Jakarta merupakan PDRB tertinggi di Indonesia. Hubungan antara PDRB dan migrasi penduduk masuk ke Jakarta dinyatakan dengan banyak penduduk yang bermigrasi ke Jakarta karena melihat PDRB di Jakarta tinggi yang artinya Jakarta mengalami kemajuan dalam perekonomian dibandingkan dengan perekonomian di daerah asal.

2.2.3 Hubungan antara jumlah penduduk dengan migrasi penduduk masuk ke Provinsi DKI Jakarta

Seseorang bekerja atau berwirausaha supaya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang padat. Timbulnya ketimpangan ekonomi di Indonesia membuat masyarakat memilih untuk berpindah ke daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna untuk memperbaiki taraf hidupnya. Banyaknya penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asalnya. Adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi ke Jakarta. Semakin banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke Jakarta mengakibatkan jumlah penduduk di Jakarta semakin meningkat, sehingga menimbulkan berbagai masalah diantaranya masalah sosial, ekonomi, dan kependudukan juga ada kaitannya dengan jumlah angkatan kerja.

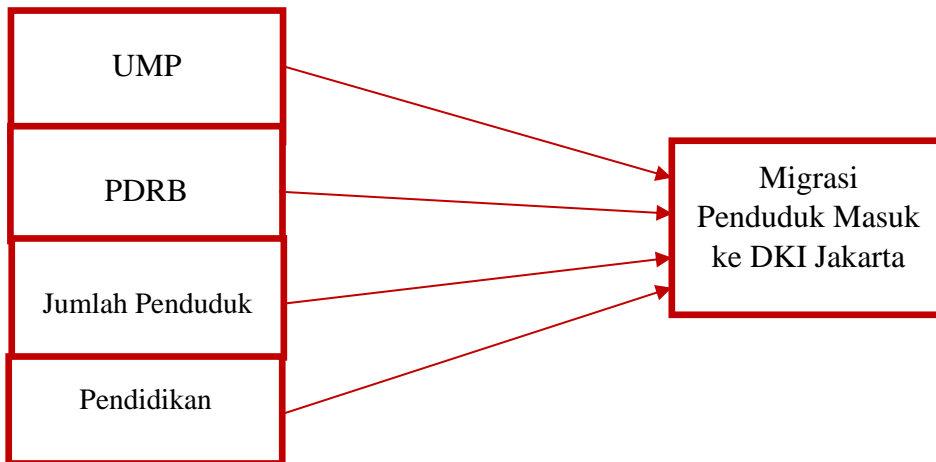
Jumlah penduduk juga memberikan efek besar yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Meski jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, namun angkanya mencapai 9.588.200 jiwa dan termasuk provinsi dengan jumlah penduduk besar. Keputusan migran untuk bermigrasi adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.

2.2.4 Hubungan antara pendidikan dengan migrasi penduduk masuk ke Provinsi DKI Jakarta

Semakin tinggi pendidikan seorang tenaga kerja maka kecenderungan atau probabilitas tenaga kerja tersebut untuk melakukan migrasi juga semakin bertambah. Dimana pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir para migran untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pendidikan yang tinggi maka tenaga kerja berpikir akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik juga maka kecenderungan bermigrasi akan tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulanda (2016) dan sesuai dengan landasan teori Ravenstein (1985) menyatakan bahwa penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat partisipasi migrasi meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir individu untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Meningkatnya pendidikan tersebut secara nyata juga akan meningkatkan pendapatan migran, sehingga menurunkan biaya migrasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka muncul kerangka pemikiran yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan UMP, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan terhadap Migrasi Penduduk Masuk ke Jakarta, maka tergambarlah kerangka pemikiran seperti berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu di uji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan data data yang berhubungan. Bisa dikatakan pula hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau dapat ditangguhkan. Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan di uji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga tingkat Upah Minimum Provinsi dan Produk Domestik Regional Bruto tiap Provinsi di luar Jakarta berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat migrasi penduduk yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015.
2. Diduga jumlah penduduk dan Pendidikan di luar Jakarta berpengaruh positif secara parsial terhadap jumlah migrasi penduduk yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta Jakarta pada periode tahun 2000, 2005, 2010, 2015.
3. Diduga Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, dan Pendidikan di luar Jakarta berpengaruh secara Bersamaan terhadap jumlah migrasi penduduk masuk ke Provinsi DKI Jakarta.